

Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19

(Studi kasus; Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)

MHD Rafi Yahya*¹, Ilham Yuri Nanda²

^{1,2}Universitas Abdurrah, Universitas Diponegoro

e-mail: *mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id, ilhamnanda99@gmail.com

Diterima: 18 Feb 2025

Direview: 19 Feb 2025

Diterbitkan: 19 Feb 2025.

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Abstract

This research wants to see how the Cash Social Assistance Program (BST) is implemented in Langgini Village, Kampar Regency to deal with people affected by COVID-19. Langgini, Kampar Regency to deal with people affected by COVID-19. This research aims to describe the program program implemented in the provision of Cash Social Assistance (BST) whether it is right on target and in accordance with the rules and expectations of the community. and according to the rules and expectations of the community. The theory used as the basis for analysis Effectiveness theory on the Cash Social Assistance (BST) program. This research using Descriptive Qualitative research type. This research found results on; Accuracy The accuracy of the target is not in accordance with the criteria; Socialization that has not been effective because there are still many who do not know; BST assistance has not been able to because there are still many who do not know; BST assistance has not been able to meet the needs of affected communities; BST assistance has not been able to meet the needs of affected communities. the needs of the affected communities; Program Monitoring that only focuses on data collection and distribution that needs to be Program monitoring that only focuses on data collection and distribution needs to be expanded to ensure that the assistance is used effectively. With this result, it is hoped that there will be comprehensive evaluation and continuous improvement to be more targeted, transparent, and have a significant impact on the people who need it most.

Abstrak

Penelitian ini ingin melihat bagaimana Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterapkan di Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar untuk menangani masyarakat yang terdampak COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan program yang diterapkan dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) apakah tepat sasaran dan sesuai aturan dan harapan masyarakat. Teori yang dijadikan dasar analisis teori Efektivitas pada program Bantuan Sosial Tunai (BST). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini menemukan hasil pada; Ketepatan Sasaran yang belum sesuai dengan kriteria; Sosialisasi yang belum efektif karena masih banyak yang belum mengetahui; Bantuan BST belum dapat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang terdampak; Pemantauan Program yang hanya fokus pada pendataan dan distribusi yang perlu diperluas untuk memastikan bantuan digunakan secara efektif. Dengan adanya hasil ini diharapkan adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan

Kata Kunci – Evaluasi, Program, Bantuan Sosial Tunai

I. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan hadirnya wabah global yang menyerang dunia yang dikenal dengan COVID-19 yang merupakan sebuah wabah yang ditakuti karena dapat menular dan berbahaya yang menyerang pernapasan manusia [1]. CO.VID-19 yang dikenal dengan *Corona Virus Disease-2019* merupakan bahwa penyakit yang menjadi pusat perhatian seluruh dunia karena berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Perkembangan virus ini yang begitu besar mengakibatkan kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan [2]. Hadirnya pandemi memberikan dampak bagi semua industri dan aspek kehidupan termasuk sektor kesehatan, sosial, ekonomi dan juga sektor keuangan [3]. Dampak yang diberikan oleh hadirnya dan meluaskan penyebaran COVID-19 pada

sektor perekonomian yang cukup besar yang juga menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya berada pada sektor ekonomi, dampak yang diberikan oleh hadirnya virus ini juga berdampak pada sektor usaha yang membuat ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang akhirnya harus tutup yang berujung pada adanya pemutusan hubungan tenaga kerja [4]. Melihat berdampaknya sektor ekonomi membuat konsumsi masyarakat menurun arus perdagangan barang dan investasi terhambat. Sehingga berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penyebaran COVID-19 yang begitu pesat mengharuskan pemerintah untuk segera menetapkan langkah strategis untuk pengawasan kesehatan[5], yang bisa memberikan pengawasan terhadap kesehatan masyarakat[6]. Salah satu upaya yang diambil untuk mengatasi penyebaran virus ini adalah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang termasuk ke dalam zona merah melalui peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB[7]. Kebijakan ini dilakukan untuk memutuskan dan mengendalikan penyebaran virus yang dapat mengancam sistem kesehatan negara. Pada dasarnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan untuk mengurangi interaksi sosial fisik antara individu sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk meminimalisir dengan cara *lock down*, *work from home*, dan *social distancing* yang dianggap efektif untuk mengatasi penyebaran COVID-19[8]. Namun, Sehubungan dengan kebijakan tersebut, maka terdapat berbagai dampak kepada masyarakat karena keterbatasan kegiatan yang ditetapkan. Kebijakan PSBB tentunya berdampak bagi masyarakat, dimana masyarakat dituntut untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah selama beberapa waktu seperti bekerja dan melakukan aktivitas lainnya. Tentunya hal ini juga dapat mengganggu perekonomian, seperti banyaknya karyawan yang terkena PHK karena pihak perusahaan tidak mencapai target penghasilan pada masa-masa sulit ini. Kondisi perekonomian di Indonesia tidak stabil. Menindaklanjuti dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai sema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Tujuan utama dari dukungan pemerintah berupa pemberian bantuan tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar serta bentuk perlindungan sosial bagi mereka yang terkenal dampak dari pandemi dan juga kebijakan PSBB[9]. Oleh sebab itu, dimasa pandemi COVID-19 pemerintah baik pusat maupun daerah, kelimpunangan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat[10].

Sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Pemerintah mengalokasikan Dana sebesar Rp.695,2 triliun dalam menangani pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Seiring dengan kondisi global di indonesia dengan adanya pandemi COVID-19 maka kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) kembali diterapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Besaran BST Rp 600.000,00 per bulan per keluarga diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak April 2020. Kementerian Sosial akan menyalurkan program BST itu kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terdapat syarat untuk mendapatkan BST diantaranya:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa/kelurahan setempat
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan ditengah pandemi COVID-19
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja
4. Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa/kelurahan
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Penerima harus berdomisili di desa/kelurahan tersebut dan menulis alamat lengkapnya
6. Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BST Kemensos Rp.600.000-, akan diberikan secara tunai dan Non Tunai

Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 merupakan langkah strategis pemerintah untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Pemberian BST ini diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di kelurahan/desa di Kecamatan Bangkinang Kota, yang terdiri dari empat kelurahan/desa yang terpapar oleh penyebaran COVID-19, yaitu Kelurahan Langgini, Kelurahan Bangkinang, Desa Kumantan, dan Desa Ridan Permai. Dari empat kelurahan tersebut, Kelurahan Langgini memiliki cakupan wilayah yang paling luas, sehingga pengelolaan dan distribusi bantuan memerlukan perhatian yang lebih intensif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Langgini, pemberian BST dimulai pada bulan Desember 2020 dengan jumlah penerima yang tercatat sebanyak 375 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan pada bulan April

2021, yang menjadi 331 orang penerima. Penurunan jumlah penerima dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang mulai pulih atau mungkin adanya penerima yang tidak memenuhi syarat lagi. Namun, meskipun jumlah penerima mengalami perubahan, antusiasme masyarakat di Kelurahan Langgini terhadap program BST ini tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan bantuan ini, mengingat kondisi ekonomi mereka yang terganggu akibat pandemi COVID-19. BST yang diberikan bukan hanya sebagai bantuan finansial semata, tetapi juga sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menghadapi masa sulit.

Evaluasi terhadap program BST di Kelurahan Langgini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana bantuan ini efektif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah proses pendistribusian bantuan, apakah sudah berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Selain itu, perlu juga diteliti apakah jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial di masa depan, sehingga bisa lebih tepat sasaran dan efisien. Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan program BST di Kelurahan Langgini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam distribusi, program ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan program bantuan sosial seperti ini agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di daerah-daerah yang terdampak pandemi.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Adapun penelitian yang terkait kajian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan melihat hasil penelitian dan bagaimana penerapan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang digunakan dan melihat eksplorasi dalam berbagai kebijakan bantuan yang diberikan.

1. Nisa'ul Muflidah (2021) dalam artikel Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada Jurnal Mahasiswa Sosial dan Sains (SOSAINS). Penelitian ini melihat bahwa COVID-19 menjadi masalah utama yang mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kabupaten Pasuruan belum efektif. Pelaksanaan suatu bantuan dapat dinilai dari seberapa jauh peningkatan kesejahteraan dan semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukannya program bantuan tersebut.[11]
2. Melati dan Zulkarnaini (2021) dalam artikel Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Pasir Pangaraian pada Jurnal Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini melihat bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak berjalan dengan efektif dikarenakan terdapat berbagai masalah di dalam pelaksanaannya seperti pada sasaran penerima yang dtuju, terkadang tidak sesuai dengan yang dituju dan tidak sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan yang dirasa masih kurang jelas kepada masyarakat.[12]
3. Tasya Ramadhani dan Rr Ervina Nadila Megawati (2021) dalam artikel Ketidakmerataan Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Selama Pandemic COVID-19 dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universtias 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah memberikan bantuan berupa sembako, bantuan sosial tunai, BLT dan dana desa. Akan tetapi bantuan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.[13]
4. Maria, Novi, dan Claree (2021) dalam artikel Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana Kota Kupang) dalam Jurnal Ekonomi Universitas Cendana Kupang. Penelitian ini menemukan hasil bahwa pengelolaan bantuan COVID-19 belum optimal. Sosialisasi menjadi pokok utama dalam bantuan yang diberikan sehingga masyarakat mempunyai kesadaran akan penitngnya melaporkan data diri yang mengakibatkan adanya data yang ganda.[14]
5. Emmy, Aspariyana, Mahadisa (2021) dalam artikel Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Tanjung Pinang dalam Jurnal Sosiologi Universitas Brawijaya. Penelitian ini menemukan hasil bahwa penerimaan BLT dan tidak penerima BLT adanya interaksi sosial yang baru bisa diterapkan dengan pola menjaga protokol kesehatan.[15]

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan penelitian, partisipan peneliti, dan lokasi penelitian. Menurut Moleo dalam [16]. Penelitian kualitatif

bertujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, aktivitas dan sebagainya secara holistic melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu permasalahan khusus yang alamiah serta dapat menggunakan berbagai metode ilmiah. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan di lapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian yang dihadapi. Tujuan dari penelitian kualitatif sendiri pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi secara mendalam.

Data-data yang diperlukan diidentifikasi dan dikumpulkan melalui alat pengumpul penelitian seperti wawancara, observasi, serta sumber data yang bersumber dari data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data verbal, data gambar, dan data tulisan. Data divalidasi dengan membandingkannya dengan sumber-sumberlainnya. Data juga divalidasi melalui konsistensi jawaban dari wawancara ataupun observasi. Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dilakukan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang ingin dicari melalui penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk dapat mendeskripsikan secara sistematis akan fakta dan karakter yang tersedia dalam suatu area yang menjadi pokok perhatian secara faktual dan seakurat mungkin. Laporan penelitiannya kemudian dituliskan berdasarkan keterwakilan partisipan, perspektif dan kerangka berfikir dari peneliti, menggambarkan suatu deskripsi kompleks serta interpretasi dari masalah dan kontribusinya dalam keliteraturan [17].

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Sosialisasi Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kampar cukup memberikan dampak bagi masyarakat [18]. Penelitian ini menemukan hasil yang didapatkan dari melihat bagaimana Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterapkan pemerintah Kabupaten Kampar terkhusus pada Kelurahan Langgini dengan melakukan *deep interview* kepada stakeholder di Kelurahan Langgini dan Masyarakat mengenai program Bantuan Sosial Tunai. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melihat berdasarkan teori Efektivitas yang mempunyai luaran (*output*) tepat sasaran dan tidak tepat sasaran. Hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam bab ini diperoleh melalui beberapa metode yang digunakan oleh peneliti yang memaparkan hasil penelitian dalam beberapa temuan, diantara lain adalah:

1. Ketepatan Sasaran Program

Sasaran program merupakan target atau sasaran dari pemerintah itu sendiri yang hendak dijadikan sebagai peserta program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini dengan maksud agar program ini menjadi program yang dapat membantu masyarakat miskin maupun kurang mampu yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Langgini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dianalisis beberapa temuan penting terkait implementasi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini. Dari perspektif pemerintah setempat, yang diwakili oleh Lurah Langgini, pelaksanaan BST telah dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020. Pernyataan ini didukung oleh Ketua RW yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Namun, terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara aparat pemerintah dengan masyarakat mengenai ketepatan sasaran program BST ini. Dari wawancara dengan penerima BST, ditemukan dua pandangan yang berbeda. Berdasarkan sumber dari salah satu narasumber selaku penerima BST, menyatakan bahwa bantuan tersebut telah tepat sasaran dan sangat membantu selama masa pandemi COVID-19. Sebaliknya, narasumber lainnya mengatakan, meskipun juga penerima BST, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakmerataan distribusi bantuan, dengan menyoroti masih banyaknya keluhan dari masyarakat yang membutuhkan namun tidak menerima bantuan.

Perspektif dari masyarakat yang tidak menerima BST semakin memperkuat adanya kesenjangan dalam implementasi program ini. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa program BST belum tepat sasaran, dengan argumentasi bahwa dampak COVID-19 dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka juga mengindikasikan adanya permasalahan dalam pendataan penerima bantuan, di mana beberapa warga yang seharusnya memenuhi kriteria justru tidak terdaftar sebagai penerima BST. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan di tingkat aparat dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat, serta mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi BST.

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini belum tepat sasaran. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengeluh bahwa ia tidak mendapatkan BST itu, sedangkan banyak yang mendapat PHK dari perusahaannya ataupun yang tidak bisa bekerja dikarenakan pada saat itu PSBB yang digalakkan oleh pemerintah mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri dirumah dan tidak boleh keluar rumah. Ketepatan sasaran dalam kebijakan ini sangat diharapkan oleh masyarakat agar pemilihan kriteria calon penerimanya dapat diseleksi dengan baik dan tidak ada

unsur pilih-pilih oleh pihak yang bersangkutan dan dapat membantu masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah titik awal dalam menentukan keberhasilan program itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggaraan terkait Kebijakan BST dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat dianalisis bahwa proses sosialisasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Lenggini menunjukkan pola komunikasi bertingkat yang bersifat *top-down*. Lurah Lenggini mengkonfirmasi bahwa tidak ada sosialisasi langsung di tingkat kelurahan, melainkan pendelegasian tugas sosialisasi kepada RT/RW untuk menyampaikan informasi kepada warganya sekaligus melakukan pendataan calon penerima bantuan.

Implementasi sosialisasi di tingkat RT/RW sejalan dengan arahan kelurahan, dimana ketua RW dan RT mengambil peran aktif dalam menginformasikan kebijakan BST kepada masyarakat. Para ketua RT/RW tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk pemberian nomor denom atau undangan pengambilan dana BST.

Namun, efektivitas metode sosialisasi ini patut dipertanyakan berdasarkan testimoni masyarakat. Penerima BST dari beberapa informan mengakui mendapatkan informasi dari RT/RW, tetapi pemahaman mereka tentang kebijakan BST masih terbatas. Lebih mengkhawatirkan lagi, masyarakat yang tidak menerima BST dari beberapa informan mengindikasikan ketiadaan sosialisasi terbuka, yang mengakibatkan ketidaktahuan mereka tentang program ini.

Temuan ini mengungkap adanya kesenjangan dalam proses sosialisasi kebijakan BST, dimana model komunikasi bertingkat yang diterapkan tidak mampu menjangkau dan memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam strategi sosialisasi untuk memastikan informasi dapat tersampaikan secara merata dan dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat, baik penerima maupun non-penerima BST.

Pernyataan beberapa masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan BST di Kelurahan Lenggini ini hanya diketahui oleh pejabat kelurahan sedangkan masyarakat masih sebagian yang mengetahuinya. Keberhasilan sosialisasi program akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan BST ini yang telah ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut. Maka dari itu sebaiknya dari pihak kelurahan langgini haruslah berusaha untuk meningkatkan proses sosialisasi agar mendapat suatu inovasi baru dalam proses sosialisasi kebijakan ini.

3. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian dalam program, tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tata cara pelaksanaannya. Pencapaian tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan kebijakan BST di Kelurahan Lenggini dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari kebijakan BST ini adalah untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 agar dapat bertahan hidup selama masa pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, terdapat perbedaan perspektif yang signifikan antara aparat pemerintah dan masyarakat mengenai pencapaian tujuan kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Lenggini. Dari sisi pemerintah, yang diwakili oleh Lurah Lenggini, beserta jajaran RT/RW, menyatakan bahwa implementasi kebijakan BST telah mencapai tujuannya. Mereka menegaskan bahwa distribusi bantuan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020, yaitu menysasar masyarakat miskin yang terdampak COVID-19.

Dari perspektif penerima BST, kebijakan ini dinilai sangat penting dan bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi. Beberapa informan mengungkapkan bahwa meskipun nominal bantuan yang diterima belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan mereka, namun bantuan tersebut sangat membantu dalam mengatasi penurunan pendapatan akibat pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan BST telah memberikan dampak positif bagi penerimanya, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal besaran bantuan.

Menariknya, masyarakat yang tidak menerima BST, juga memberikan dukungan terhadap kebijakan ini. Mereka mengakui pentingnya bantuan tersebut bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, namun tetap menyoroti permasalahan dalam hal pemerataan distribusi bantuan. Observasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi keberhasilan program dari sisi pemerintah dengan realitas di lapangan, dimana masih terdapat kelompok masyarakat yang merasa tertinggal dari jangkauan program ini.

Analisis ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan BST telah mencapai sebagian tujuannya dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal pemerataan distribusi dan kecukupan nominal bantuan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme pendataan dan distribusi bantuan untuk memastikan bahwa program ini dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti wawancara kepada masyarakat diatas, dapat dikatakan bahwasanya Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat diperlukan oleh masyarakat dikarenakan kebijakan ini dapat membantu mereka selama masa pandemi dan masyarakat juga mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan ini. Dengan Bantuan Sosial Tunai ini setidaknya dapat dipergunakan masyarakat untuk membeli keperluan sehari-hari. Namun melihat fakta lapangan yang juga dirasakan oleh masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) masih banyak masyarakat yang tidak menerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Oleh sebab itu jika berbicara mengenai efektifitas maka akan lebih baik calon penerima kebijakan BST ini diprioritaskan kepada masyarakat yang lebih terdampak secara ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendeteksi tentang pekerjaan dari calon penerima BST.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan, pelaksanaan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dan kemudian mengambil tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemantauan program yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, yang dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh suatu program berjalan. Pemantauan juga dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaannya kebijakan ini berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat dilihat kekurangannya dan kemudian dicarikan solusinya dari permasalahan itu. Pemantauan kepada masyarakat penerima manfaat atau penerima dana Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu langkah dari pihak kelurahan untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik juga untuk dapat memastikan apakah Bantuan Sosial Tunai yang telah diberikan kepada masyarakat penerima manfaat itu efektif ataupun tidak dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat dianalisis bahwa mekanisme pemantauan implementasi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini lebih berfokus pada tahap pendataan dan distribusi, sementara pemantauan pasca penyaluran bantuan tidak dilakukan. Lurah Langgini, mengonfirmasi bahwa pemantauan terbatas pada pengumpulan laporan penerima dari setiap RW dan verifikasi dokumen saat pencairan dana, yang meliputi pemeriksaan KTP, KK, dan nomor denom.

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan Ketua RW dan RT yang menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan terutama pada aspek administratif, seperti pencocokan data dan pengawasan proses pencairan di kantor lurah. Proses verifikasi ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa penerima bantuan adalah orang yang bersangkutan dan sesuai dengan data yang terdaftar.

Testimoni dari beberapa informan penerima BST, mengkonfirmasi adanya mekanisme verifikasi yang ketat saat pencairan dana, termasuk pencocokan nomor KTP, NIK, dan pemberian bukti transaksi. Namun, mereka juga menegaskan tidak adanya pemantauan setelah dana tersebut disalurkan.

Menariknya, masyarakat yang tidak menerima BST, menyuarakan harapan akan pentingnya pemantauan yang lebih komprehensif. Mereka menekankan perlunya pengawasan untuk memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan. Aspirasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem pemantauan, tidak hanya pada tahap distribusi tetapi juga pada tahap pasca penyaluran bantuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme pemantauan yang ketat dalam proses administratif dan distribusi BST, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemantauan dampak dan efektivitas bantuan setelah disalurkan. Hal ini mengisyaratkan perlunya pengembangan sistem monitoring yang lebih komprehensif untuk memastikan pencapaian tujuan program secara optimal dan berkelanjutan.

Dari hasil analisis wawancara kepada masyarakat diatas, penulis menyimpulkan bahwa di dalam indikator pemantauan program BST ini tidak ada dilakukan pemantauan ditahap akhirnya, hanya ada pemantauan sewaktu penerimaan saja. Dilakukan pemantauan dengan cara melakukan pencocokan KK/KTP para penerima BST oleh kelurahan. Dengan ketidak efektifitasan dari pemberi Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berada di lapangan terlihat bahwa kurangnya pemantauan dari pihak stakeholder terhadap penerima bantuan. Hal ini dibuktikan adanya

masyarakat yang merasa tidak layak untuk menerima kebijakan tersebut namun mendapatkan bantuan kebijakan tersebut. Tetapi terdapat masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Melihat hal ini perlu adanya penanganan lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini memerlukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran. Evaluasi ini perlu fokus pada beberapa aspek kritis, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Pertama, terkait ketepatan sasaran, ditemukan bahwa masih banyak warga yang memenuhi kriteria tetapi tidak menerima bantuan, sementara ada yang merasa tidak layak justru menerima. Oleh karena itu, evaluasi harus mencakup perbaikan sistem pendataan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan transparansi dalam penentuan kriteria penerima. Kedua, sosialisasi program yang selama ini dilakukan secara top-down melalui RT/RW dinilai belum efektif karena masih banyak warga yang tidak mengetahui atau memahami program BST. Evaluasi perlu mengarah pada strategi sosialisasi yang lebih inklusif, seperti menggunakan media komunikasi yang beragam dan melibatkan pertemuan warga secara langsung. Ketiga, meskipun program BST telah membantu sebagian penerima, nominal bantuan dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan masih ada kelompok masyarakat yang merasa tidak terjangkau. Evaluasi harus mencakup peninjauan besaran bantuan serta prioritas penerima berdasarkan tingkat dampak ekonomi yang dialami. Terakhir, pemantauan program yang hanya fokus pada tahap pendataan dan distribusi perlu diperluas hingga tahap pasca penyaluran untuk memastikan bantuan digunakan secara efektif. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan, program BST di Kelurahan Langgini dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Berikut saran bagi Pemerintah daerah, perlu meningkatkan akurasi sistem pendataan penerima bantuan dengan mengadopsi metode survei berbasis komunitas serta teknologi data yang lebih transparan. Melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi dapat meningkatkan keadilan dan akuntabilitas. Sosialisasi program perlu dilakukan secara lebih inklusif dengan memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial, radio komunitas, dan pertemuan tatap muka. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa informasi terkait program BST tersampaikan dengan baik kepada seluruh warga, terutama kelompok rentan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terutama kepada stakeholder terkhusus pada Lurah Langgini beserta RT dan RW di Kelurahan Langgini dan juga kepada masyarakat penerima maupun tidak penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Langgini yang telah bersedia memberikan informasi dan akses yang diperlukan dan meluangkan waktu untuk berbagai wawasan dan pengalaman yang berharga. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kebijakan bantuan-bantuan Sosial Tunai untuk kedepannya, serta dapat memperkaya literatur di bidang sosial dan kebijakan bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. S. D. Nugraha, E. P. Sanggarwati, and S. Al-Fatih, "Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi COVID-19," *Indonesia Law Reform Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 209–227, 2021.
- [2] Y. Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur," *Wellness And Healthy Magazine*, vol. 2, no. 1, pp. 187–192, 2020.
- [3] A. N. Azizah and I. Prabawati, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung," *Publika*, pp. 459–474, 2021.
- [4] A. I. Fahrika and J. Roy, "Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh," *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, vol. 16, no. 2, pp. 206–213, 2020.
- [5] H. Harapan *et al.*, "Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review," *Journal of Infection and Public Health*, vol. 13, no. 5, pp. 667–673, 2020, doi: 10.1016/j.jiph.2020.03.019.
- [6] M. B. N. Wajdi, Iwan Kuswandi, Umar Al Faruq, Z. Zulhijra, K. Khairudin, and K. Khoiriyah, "Education Policy Overcome Coronavirus, A Study of Indonesians," *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, vol. 3, no. 2, pp. 96–106, 2020, doi: 10.29062/edu.v3i2.42.
- [7] W. Rahmansyah, R. A. Qadri, R. R. A. Sakti, and S. Ikhsan, "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, vol. 2, no. 1, pp. 90–102, 2020, doi: 10.31092/jpkn.v2i1.995.

- [8] A. Chudik, M. H. Pesaran, and A. Rebucci, "Voluntary and Mandatory Social Distancing: Evidence on COVID-19 Exposure Rates from Chinese Provinces and Selected Countries," *NBER Working Paper Series*, no. April, pp. 692–712, 2020.
- [9] A. Mufida, "Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic Covid 19," *adalah buletin hukum & keadilan*, vol. 4, no. 1, pp. 159–166, 2020.
- [10] Ihsanuddin and E. Kristian, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus COrona di Indonesia," 2020.
- [11] N. Mufida, "Efektivitas bantuan sosial tunai di kelurahan Purwosari kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan," *Jurnal sosial dan sains*, vol. 1, no. 2, pp. 82–92, 2021.
- [12] M. Melati and H. Zulkarnaini, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian," *Journal Publicuho*, vol. 4, no. 1, p. 19, 2021.
- [13] T. Ramadhani and R. E. N. Megawati, "Ketidakmerataan bantuan pemerintah kepada masyarakat selama pandemi COVID-19," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 4, no. 2, pp. 147–158, 2021.
- [14] M. P. L. Muga, N. T. Kiak, and C. S. Maak, "Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana–Kota Kupang)," *OECOMICUS Journal of Economics*, vol. 5, no. 2, pp. 105–112, 2021.
- [15] E. Solina, A. Aspariyana, and M. Mahadiansar, "Dampak sosial ekonomi masyarakat penerima bantuan langsung tunai masa Pandemi COVID-19 di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Neo Societal; Vol*, vol. 6, no. 2, 2021.
- [16] D. P. Lestary, "Efektivitas Program Surabaya Health Season Sebagai Layanan Publik Sektor Kesehatan Di Rsud Dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Studi Pada Layanan Rawat Jalan Rsud Dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya)," *Publika*, vol. 6, no. 5, pp. 125–126, 2018.
- [17] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications, 2016.
- [18] I. Y. Nanda, M. H. D. R. Yahya, and T. Yuwono, "Analisis Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kampar," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 5, no. 1, pp. 285–297, 2023.